
NOTA DINAS
NOMOR: 640 /IJ-IND.1/PR/X/2020

Kepada Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan PP39 Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III tahun 2020
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Tanggal : Oktober 2020

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Eselon II Inspektorat Jenderal Triwulan III (Juli-September) 2020.

Realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan III tahun 2020 (Juli-September) mencapai Rp5.684.471.730,- atau sebesar 22,92% dari pagu anggaran sebesar Rp24.803.127.000,- dengan realisasi fisik sebesar 18,21%. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (Januari-September) mencapai Rp16.016.644.338,- (64,94%) dengan realisasi fisik sebesar 56,59%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

ttd

Liliek Widodo



Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

**TRIWULAN III
TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Oktober 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Triwulan III Tahun 2020 juga sebagai informasi atas capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Triwulan III, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Oktober 2020

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

LILIEK WIDODO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi.....	3
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020	6
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	9
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN.....	18
A. Hasil Yang Telah Dicapai.....	18
B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran.....	18
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	40
D. Langkah Tindak Lanjut	40
BAB IV. PENUTUP.....	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020...	6
Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2020	6
Tabel 3. Informasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020	11
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	16
Tabel 5. Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	17
Tabel 6. Data Penyelesaian Tindak Lanjut s/d Triwulan III Tahun 2020 ...	21
Tabel 7. Nilai SAKIP Eselon I Kemenperin	22
Tabel 8. Tim Verifikator Masing-masing Inspektorat	25
Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2020.....	34
Tabel 10. Realisasi Kegiatan/Output Sekretariat Inspektorat Jenderal	39
Tabel 11. Kegiatan Fisik dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III	39

BAB I. PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan adanya dukungan teknis, administrasi, dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1** Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- 2** Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
- 3** Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan

- 4 Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja) dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;

2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. **Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

2 Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari :

- a. Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3 Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

4 Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana serta tata usaha.

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah "Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal", dengan rincian kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-
3.	Layanan Perkantoran	12 Layanan	-

Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 mempunyai 3 (tiga) output (keluaran) dengan anggaran sebesar Rp24.803.127.000,-. Untuk menghasilkan output tersebut, telah dialokasikan anggaran melalui kegiatan-kegiatan (aktivitas) sebagai berikut :

Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2020

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
1845	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal		24.803.127.000
1845.950	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	2.932.744.000
051	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran		425.877.000
A	Koordinasi program pengawasan		218.307.000
C	Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal		10.550.000
E	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		9.900.000
G	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Program		187.120.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
	di Lingkungan Kementerian Perindustrian		
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		167.630.000
A	Koordinasi penyusunan Perjanjiaan Kinerja dan Rencana Kinerja		128.797.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan		7.450.000
C	Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN		12.280.000
E	Reviu Perkin dan Renstra		5.725.000
053	Pengelolaan Data dan Informasi		315.060.000
AA	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		103.670.000
AC	Bimbingan teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut		68.500.000
AD	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		23.100.000
AE	Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		8.900.000
AF	Rapat Koordinasi Pengawasan		21.800.000
BA	Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan		750.000
BC	Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		2.000.000
BD	Penyusunan Laporan APIP		8.940.000
BE	Penilaian SAKIP Eselon I		39.400.000
CA	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		38.000.000
054	Pengelolaan Keuangan		172.295.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		69.025.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN Lingkungan Kemenperin		47.100.000
C	Penyusunan Laporan dan Keuangan dan BMN		35.820.000
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		11.300.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		9.050.000
056	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		565.169.000
A	Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		78.544.000
C	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi hukum di Bidang Pengawasan		231.980.000
D	Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan		22.140.000
G	Pelaksanaan Penelaahan Sejawat		33.225.000
H	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		71.240.000
I	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian		128.040.000
057	Pengelolaan Kepegawaian		399.765.000
A	Koordinasi Pengembangan SDM		66.743.000
B	Keikutsertaan diklat pengembangan SDM		57.310.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
	ITJEN		
D	Pelatihan di Kantor Sendiri		29.800.000
E	Koordinasi pembinaan kepegawaian		94.130.000
F	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		123.742.000
J	Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		28.040.000
058	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		289.176.000
D	Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal		61.460.000
E	Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif		8.000.000
F	Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan		46.396.000
G	Percepatan penanganan dan antisipasi COVID 19 di lingkungan Inspektorat Jenderal		173.320.000
060	Pelayanan Humas dan Protokoler		297.627.000
B	Pemutakhiran Data dan Informasi		12.467.000
C	Penerbitan Majalah Solusi		153.220.000
D	Pengelolaan Media Informasi Pengawasan		55.280.000
E	Perjalanan Dinas Pimpinan		131.940.000
061	Pelayanan Organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		300.145.000
A	Penilaian SPIP Satuan Kerja Kementerian Perindustrian		10.540.000
B	Evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		2.070.000
D	Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		141.360.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian		72.325.000
F	Pembinaan tata kelola Pemerintahan		73.850.000
1845.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)	1 Layanan	105.000.000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		105.000.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		105.000.000
1845.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	21.765.383.000
001	Gaji dan Tunjangan		17.000.000.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		17.000.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.765.383.000
A	Honorarium Operasional		1.936.192.000
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		297.089.000
C	Biaya Langganan dan Operasional Kantor		1.104.360.000
D	Koordinasi Layanan Pimpinan		320.000.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		822.742.000
F	Antisipasi COVID-19 di Lingkungan Inspektorat Jenderal		285.000.000

B Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran program/ kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan aktivitas yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Pengelolaan Data dan Informasi;
4. Pengelolaan Keuangan;
5. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal;
6. Pengelolaan Kepegawaian;
7. Pelayanan Umum dan Perlengkapan;
8. Pelayanan Humas dan Protokoler;
9. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi;
10. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
11. Gaji dan Tunjangan;
12. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Hubungan Sasaran dan Program serta aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah disahkan dalam perjanjian kinerja dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3. Informasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan Pendukung
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut; - Temu teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut; - Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi dan reviu Inspektorat Jenderal; - Rapat Koordinasi Pengawasan
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	70%	<ul style="list-style-type: none"> - Forum komunikasi PMPRB; - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas; - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko *)IKU	Level 3	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin; - Implementasi SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal; - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan Pendukung
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN; - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3; - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja; - Reviu Perkin dan Renstra; - Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP; - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; - Penilaian SAKIP eselon II Itjen; - Pra evaluasi SAKIP ITJEN
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10%	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Informasi Pengawasan; - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan; - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal; - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi; - Penerbitan Majalah Solusi.
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan; - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal; - Penyusunan peta proses bisnis Inspektorat Jenderal
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	70%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan; - Penyusunan Jakwas; - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan Pendukung
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal; - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan; - Reviu RKA-KL
		Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80%	- Pemutakhiran Data dan Informasi
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal; - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan; - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri; - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik; - Penyusunan Laporan APIP; - Penilaian SAKIP eselon I Kemenperin
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	<i>Sharing knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	- Pelatihan di Kantor Sendiri
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM; - Keikutsertaan diklat pengembangan SDM Itjen; - Penilaian dan penetapan angka kredit

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan Pendukung
				jabatan fungsional auditor; - Evaluasi penilaian prestasi kerja 2020 dan penyusunan SKP 2021; - Fasilitasi bebas masa tugas menjelang pensiun; - Koordinasi pembinaan kepegawaian
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%	- Koordinasi pelaksanaan pelayanan, bantuan dan konsultasi hukum di bidang pengawasan; - Fasilitasi pelaksanaan pemantauan kode etik auditor.
		Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran; - Pembayaran Gaji dan Tunjangan; - Honorarium Operasional; - Persediaan dan Perlengkapan Kantor; - Biaya Langganan dan operasional perkantoran; - Koordinasi dan layanan pimpinan; - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor; - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan; - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif; - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal; - Bimbingan dan Pengawasan Aspek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan Pendukung
				Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Pelayanan Perbendaharaan; - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN; - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN; - Penyusunan RK-BMN.

➤ **Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat**

Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2020 adalah :

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	70%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko *)IKU	3
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	IACM Level 3
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10%
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	70%
		Tingkat perolehan Data dan informasi	80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		pengawasan yang memadai	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	Sharing knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor Layanan Perkantoran	90%
			12 Layanan

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan (Output)**

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
2. Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana;
3. Tersedianya Layanan Perkantoran.

Tabel 5. Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25
2	Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25
3	Layanan Perkantoran	12 Layanan	3	3	3	3

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Realisasi keuangan triwulan III tahun 2020 (Juli-September) 2020 mencapai Rp5.684.471.730,- atau sebesar 22,92% dari pagu anggaran sebesar Rp24.803.127.000,- dengan realisasi fisik sebesar 18,21%. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (Januari-September) 2020 mencapai Rp16.016.644.338,- (64,94%) dengan realisasi fisik sebesar 56,59%.

B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2020 adalah Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya. Pada Triwulan III, meskipun beberapa kegiatan telah terlaksana, namun sebagian besar kegiatan lainnya harus dihapuskan karena adanya penghematan anggaran sebagai dampak pandemi COVID-19.

Kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah terlaksana pada triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Rencana Penganggaran dan *Refocusing* Anggaran

Pada bulan September telah dilakukan revisi DIPA berdasarkan surat pengajuan Inspektur Jenderal Nomor 272/IJ-IND/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Revisi ini merupakan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap, dan/atau ralat karena kesalahan administrasi dengan pagu tetap, yaitu sebesar Rp30.111.422.000,- untuk seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal dan sebesar Rp24.803.127.000,- untuk unit Sekretariat Inspektorat Jenderal. Tujuan dilakukannya revisi ini adalah untuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Inspektorat Jenderal,

antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan serta mempercepat pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal serta meningkatkan efektifitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Usulan revisi tersebut telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta sesuai surat nomor S-3556/WPB.12/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ke-03, satker Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (247885).

Berdasarkan revisi tersebut, jumlah anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp738.262.000,- dari semula Rp564.369.000,- (bertambah sebesar 30,81%). Kenaikan anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan rapid test & PCR test dalam rangka kegiatan audit kinerja dan belanja jasa dalam rangka penyusunan peta risiko satuan kerja. Sampai dengan akhir September 2020, realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp189.361.531,- atau 25,65%.

Dengan demikian sampai dengan bulan September 2020 telah dilakukan revisi dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Jenderal sebanyak 3 (tiga) kali dan revisi dokumen DIPA sebanyak 3 (tiga) kali.

Kemudian, menindaklanjuti rapat percepatan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, Sekretaris Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dalam menyusun rencana kegiatan dan penarikan anggaran secara ketat. Sehingga apabila terdeteksi ada anggaran yang kemungkinan tidak dapat terserap, akan dialihkan untuk melaksanakan PCR/SWAB test bagi pegawai Inspektorat Jenderal.

Permasalahan yang dihadapi pada akhir triwulan III ini adalah terbitnya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian Frequently Asked Question (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Dalam SE tersebut diatur bahwa bahwa kegiatan yang tidak terkait langsung harus menggunakan akun biasa. Sementara selama ini telah terlanjur dilakukan penyesuaian akun kegiatan dengan menggunakan akun COVID-19. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi anggaran dalam rangka ralat akun.

Dalam penyusunan pagu alokasi tahun 2021, Sekretariat Inspektorat Jenderal cq. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan memerlukan kelengkapan perencanaan anggaran Inspektorat Jenderal berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sampai dengan level detail dengan menggunakan struktur RSPP (Restrukturisasi Sistem Penganggaran Pemerintah) kepada masing-masing unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk menindaklanjuti penyusunan pagu alokasi tahun 2021, akan diselenggarakan rapat pada tanggal 1 Oktober 2020.

Selain itu, dalam rangka menyesuaikan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Inspektorat Jenderal Tahun 2021 masih perlu dilakukan koordinasi dengan DJA pada tahap pagu alokasi.

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Data terkait penyelesaian temuan hasil pengawasan internal adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Data Penyelesaian Tindak Lanjut s/d Triwulan III Tahun 2020

No	Satker	Jumlah Temuan	Nilai	Jml TL	Saldo Temuan	Jumlah Rekomendasi	SR	BSR
1	Pusat	136	Rp10.374.970,-	6	130	192	14	3
2	Balai Besar	0	-	0	0	0	0	0
3	Baristand	0	-	0	0	0	0	0
4	Balai Diklat	7	-	4	3	7	4	3
5	Sekolah	61	-	21	40	94	37	12
6	Dekonsentrasi	0	-	0	0	0	0	0
TOTAL		204	Rp10.374.970	31	173	293	55	18

Metode penghitungan dari indikator ini adalah membandingkan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) dan Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai rencana aksi yang dibuat oleh satker dengan jumlah total rekomendasi.

Dari data tersebut terlihat bahwa posisi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal mencapai 24,91% dari target yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 91%.

Kemudian, pada triwulan III ini telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan penyelesaian saldo temuan hasil pengawasan eksternal melalui *video conference*. Menindaklanjuti rapat tersebut, saat ini sedang dilakukan pembuatan surat penyelesaian tindak lanjut berdasarkan hasil rapat dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Satker yang memiliki temuan.

Berdasarkan LHP BPK nomor 11b/LHP/XV/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan nomor 11c/LHP/XV/05/2020 tanggal 12

Mei 2020 tentang kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, terdapat sebanyak 14 (empat belas) temuan dan 28 (dua puluh delapan) rekomendasi pada Laporan Keuangan TA 2019. Temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) berjumlah 4 (empat) temuan dengan rekomendasi berjumlah 6 (enam) rekomendasi. Temuan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berjumlah 10 (sepuluh) dengan rekomendasi berjumlah 22 (dua puluh dua) rekomendasi. Total temuan yang harus disetor ke kas Negara Rp4.967.582.710,63 dengan target penyelesaian Desember 2020. Nilai yang sudah disetor sampai dengan 25 Agustus 2020 sebesar Rp1.011.346.557,-.

3. Evaluasi SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian

Evaluasi atas implementasi SAKIP unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian dimulai dengan pendaftaran admin unit eselon I pada aplikasi SAKIP Kemenperin, pengunggahan dokumen akuntabilitas ke aplikasi SAKIP online serta penilaian SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 20-28 Juli 2020. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan konfirmasi pada tanggal 29 Juli 2020 dan rapat pleno antar tim penilai serta penandatanganan Berita Acara pada tanggal 30 Juli 2020. Berikut ini adalah hasil penilaian SAKIP Eselon I Tahun 2019:

Tabel 7. Nilai SAKIP Eselon I Kemenperin

No	Eselon I	Nilai 2020	Nilai 2019
1	Ditjen Industri Agro	86,51 (A)	84,77 (A)
2	BPPI	83,80 (A)	87,18 (A)
3	Ditjen IKMA	82,16 (A)	81,42 (A)
4	Sekretariat Jenderal	81,69 (A)	83,24 (A)
5	Ditjen ILMATE	81,27 (A)	78,44 (BB)

No	Eselon I	Nilai 2020	Nilai 2019
6	Ditjen IKFT	80,54 (A)	75,49 (BB)
7	Inspektorat Jenderal	75,41 (BB)	81,96 (A)
8	Ditjen KPAII	73,44 (BB)	85,29 (A)
9	BPSDMI	72,34 (BB)	-

4. Implementasi Zona Integritas dan penerapan WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Perindustrian

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Zona Integritas (ZI) serta penerapan WBK/WBBM yang telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2020, serta berdasarkan diskusi dengan KEMENPAN dan RB, berikut beberapa catatan hasil evaluasi dijumpai pada satker di lingkungan Kemenperin :

- a. Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 (enam) area perubahan;
- b. Belum terlihat terjadinya pola pikir dan budaya kerja. Dalam hal ini satker hanya fokus mengejar nilai/penghargaan;
- c. Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah;
- d. Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah;
- e. Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar *public campaign* dan belum pada pembangunan secara sistemik;
- f. Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut Kertas Kerja Evaluasi (KKE) internal dengan kondisi nyata di lapangan;

- g. Pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* eksternal/masyarakat belum dilakukan secara efektif;
- h. Inovasi pelayanan belum sepenuhnya bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan *stakeholder*; dan
- i. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat.

5. Laporan APIP Semester I Tahun 2020

Laporan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semester I Tahun 2020 telah disampaikan ke KeMENPAN & RB pada tanggal 1 September. Namun demikian, sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020, Inspektorat Jenderal belum dapat menyusun Laporan Hasil Pengawasan Internal yang harus disampaikan kepada Menteri Perindustrian, sebagaimana diatur dalam Permenperin No 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian Pasal 39.

6. Pengisian SIHARKA

Pengisian SIHARKA (Aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan ASN yang dikeluarkan oleh Menpan RB) telah selesai diisi oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal sampai tanggal 28 Juli 2020. Aplikasi ini bertujuan mempermudah proses audit penghasilan ASN. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) non auditor dan pejabat eselon I dan II di lingkungan Inspektorat Jenderal telah menyampaikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi SIHARKA.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor R/1251/SJ-IND.2/KP/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di

lingkungan Kementerian Perindustrian melalui aplikasi SIHARKA dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam hal Inspektorat bertindak selaku verifikator. Masing-masing Inspektorat telah membentuk tim verifikator sebagai berikut:

Tabel 8. Tim Verifikator Masing-masing Inspektorat

No	Inspektorat	Unit	Auditor yang ditugaskan
1	Inspektorat I	BPSDMI Sekretariat Jenderal	1. Jelita Berliana 2. Arantxa Tiar
2	Inspektorat II	Ditjen IKMA dan BPIPI	Pengendali Mutu: Edy Waspan Pengendali Teknis: Razali C Ketua Tim: Rizki Aviandri Anggota: 1. Giry Rachman 2. Agung Tri Utomo 3. Galih Tri Purnomo 4. Dinavita Rizkyanti
		Ditjen ILMATE	Pengendali Mutu: Edy Waspan Pengendali Teknis: Abdul Hamid Ketua Tim: Dwi Harjanto Anggota: 1. Hariadi Amri 2. Alexander H Nainggolan 3. Armanita Kusumaningrum 4. Azka Rianto TN
3	Inspektorat III		-

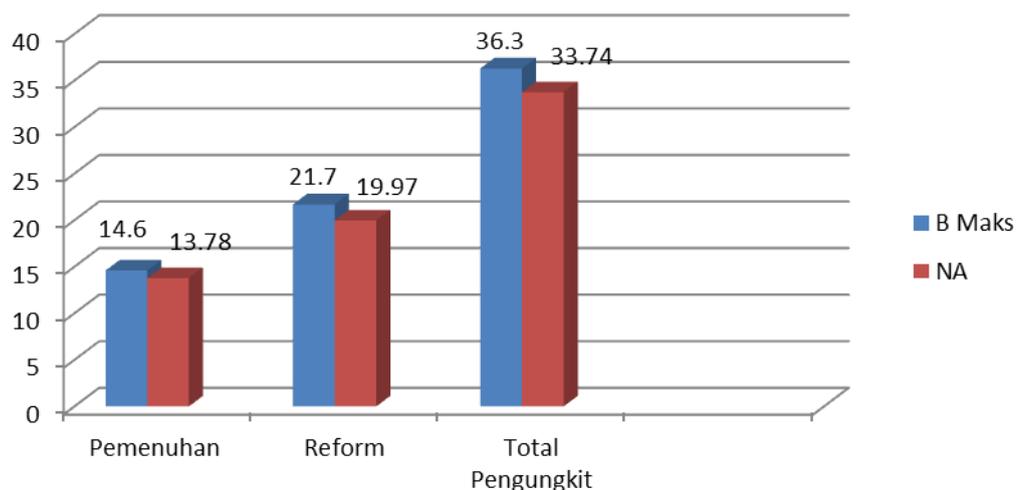
No	Inspektorat	Unit	Auditor yang ditugaskan
4	Inspektorat IV	Ditjen KPAII	1. Ciendy Martha Gayatri 2. Zuan Andri Wijayanto
		Ditjen IKFT	1. Tjahyono 2. Tiurma Julian Pardede
		Ditjen Agro	1. Dyan Garneta 2. Abu Naim Toyib

7. Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan di bulan April 2020 dimulai dari proses persiapan, koordinasi, pembentukan tim, penilaian sampai penetapan nilai akhir di bulan Juli 2020. Sesuai hasil konsensus antara seluruh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian), Nilai Akhir PMPRB Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Nilai PMPRB Unit Kerja Eselon I rata-rata sebesar 33,74 dari 36,30 (92,96%),
- b. Nilai PMPRB Unit Pusat (Kementerian) sebesar 77,56 dari 100,00 (77,56%),
- c. Nilai Index PMPRB Kementerian Perindustrian sebesar 79,17 dari 100,00 (79,17%).

Berikut ini adalah rata-rata nilai PMPRB unit kerja eselon I Kementerian Perindustrian tahun 2020



Keterangan :

B Maks : Bobot Maksimal

NA : Nilai Akhir

8. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)

Dalam rangka penataan tata laksana yang efektif dan efisien di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12 dan pasal 16 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap SOP AP yang harus diisi oleh para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian sebagai penanggung jawab kegiatan. Sampai dengan laporan disusun, hasil monev belum dapat dilaporkan.

9. Penyelenggaraan Pelatihan di Kantor Sendiri dan Diklat- Diklat

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan menyamakan persepsi antar auditor dalam melaksanakan tugas, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Di Kantor Sendiri, antara lain :

- a. “Redesain Sistem Penganggaran” (13 Juli 2020) dengan narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
- b. “Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021” (13 Juli 2020), dengan narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
- c. “Bagan Akun Standar” (15 Juli 2020);
- d. “Persamaan Persepsi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai PermenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015” (17 Juli 2020) dengan narasumber dari Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II;
- e. “Pengawasan dan Tindak Lanjut Solusi Kontrak di Masa Pandemi” (30 Agustus 2020) dengan narasumber Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, LKPP;
- f. “Penyusunan RSNI di Lingkungan Kemenperin” (1 September 2020) dengan narasumber Kabid Perumusan dan Penguatan Standarisasi Industri, BPPI; dan
- g. “Penerbitan dan Pengawasan SNI” (1 September 2020) dengan narasumber Kasubdit Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN.
- h. “Sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan (September 2020) dengan narasumber dari Biro Keuangan;

- i. “Data Analitik Dalam Audit” (11 September 2020) dengan narasumber IT Audit Head, Audit Data Science Head, Audit Data Engineer Head (CIMB);
- j. “Penerbitan dan Pengawasan SNI oleh BSN” (1 September 2020) dengan narasumber dari Badan Standarisasi Nasional (BSN);
- k. “Penyusunan RSNI di Lingkungan Kementerian Perindustrian” (1 September 2020) dengan narasumber dari Pusat Standarisasi Industri, BPPI.

10. Pengelolaan Kepegawaian

Sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan SDM, telah dilakukan *Fit and Proper Test* kenaikan jenjang 5 (orang) auditor pada tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Suwarta, Abu Naim Toyib, Tiurma Juliani Pardede, Zita Tessa Rahayani dan Rayersaad Saesar AG. Laporan hasil *Fit and Proper Test* disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal sesuai nota dinas nomor 606/IJ-IND.1/KP/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

Kemudian, dalam hal pengelolaan kepegawaian, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengikutsertaan 3 (tiga) orang pegawai pada diklat penjenjangan calon auditor, dimana *e-learning* telah dilaksanakan pada tanggal 10-22 Juli 2020 dan pembelajaran tatap muka jarak jauh dilaksanakan tanggal 29 Juli – 18 Agustus 2020. Peserta yang mengikuti diklat ini adalah Gun Gun Gumilar Nurul Zatznika, Elizabeth Frycillya Aritonang, dan Noer Dwi Rizkia Putri. Jadwal ujian dilaksanakan tanggal 14-17 September 2020;

- b. Penyampaian Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol 2 ke BPSDMI atas nama Farha Maulidia dan Fernando Noverian Juve Vieri Rahmanto;
- c. Penyampaian Akun Operator Satker untuk inpassing Jafung Perbendaharaan ke KPPN VII;
- d. Penyampaian undangan Seleksi Calon Auditor Muda atas nama M Adhi Rachmaidi tanggal 28 September 2020;
- e. Koordinasi Revisi Formasi Jafung Perbendaharaan; dan
- f. Koordinasi peserta inpassing Jafung Perbendaharaan atas nama Munawir, Rosiana Taruni, Ira Sukmayanti dan Sutarno;
- g. Penyampaian calon Peserta diklat Infografis 2 ke BPSDMI an. Desmy Fitra.

11. Keuangan

Terkait dengan adanya perubahan akun belanja sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID serta hasil rapat bersama Biro Keuangan, KPPN dan Ditjen Perbendaharaan diperoleh kesepakatan dan poin penting sebagai berikut:

- a. Konsumsi rapat untuk rapat parsial (Zoom dan hadir di kantor) menggunakan akun 521241, isi undangan rapat mencantumkan keterangan id meeting dan rapat dikantor dilaksanakan di ruang apa dan dilengkapi dengan absensi online (bagi para peserta Zoom) dan absensi biasa (bagi peserta hadir fisik di rapat);
- b. Pembelian vitamin dan penambah daya tubuh sudah tidak boleh dilakukan;

- c. Paket pulsa/internet tidak boleh diberikan dalam bentuk uang, harus diberikan dalam bentuk paket data langsung dengan nilai maksimal Rp150.000,-;
- d. Kegiatan pengadaan belanja modal berupa 8 (delapan) unit meja kantor, 10 (sepuluh) unit MS office dan 5 (lima) unit mesin scanner dengan total biaya sebesar Rp 102.051.400,-.

Revisi akun wajib dilakukan termasuk bagi yang sudah terlanjur dicairkan ke KPPN dan sudah terbit SPPD, setelah revisi dilakukan nantinya akan dilakukan ralat SPM bagi SPPD tersebut. Berkaitan dengan telah selesainya proses revisi ralat akun, maka bagian keuangan perlu merevisi LPJ Bendahara dari bulan Maret 2020 untuk kemudian melakukan ralat akun ke KPPN, dan melakukan revolving Uang Persediaan (UP).

Kegiatan pada sub bagian keuangan merupakan kegiatan yang bersifat rutin berupa layanan bulanan. Adanya kebijakan WFH, tidak menghambat proses administrasi dan pengajuan keuangan, karena telah sub bagian keuangan telah menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga proses tetap berjalan normal.

Kemudian telah dicairkan biaya komunikasi dalam bentuk uang pulsa selama 2 bulan (April-Mei) untuk pejabat eselon I sampai dengan honorer dengan nominal sebesar Rp135.000,-/bulan. Dan telah dicairkan honor tim bulanan untuk periode bulan Juni – Agustus.

12. Penyusunan Peraturan

Penyusunan peraturan Terkait dengan penyusunan peraturan-peraturan di lingkungan Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan Juni 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut:

- a. Inspektur Jenderal telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal sesuai surat Nomor 166/IJ-

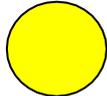
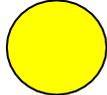
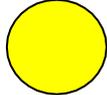
IND/HK/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Rancangan Permenperin Tentang Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;

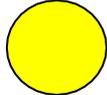
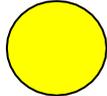
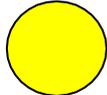
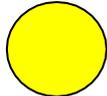
- b. Telah disusun beberapa konsep Peraturan, yaitu Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Internal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang Kendali Mutu Pengawasan, dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal. Keempat peraturan tersebut rencana akan difinalisasikan pada bulan Juli dan September 2020;
- c. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi telah membuat usulan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dan telah disampaikan ke Biro Kepegawaian. Namun belum ada tindak lanjut atas hal tersebut;
- d. Penyusunan konsep pedoman audit kinerja penumbuhan dan pengembangan pada Ditjen IKMA pada tahap finalisasi dengan target penyelesaian sampai akhir tahun 2020;
- e. Evaluasi peraturan yang menghasilkan output berupa penyusunan SK tim yang telah selesai dan sudah ditandatangani;
- f. Pembahasan Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor pada 5 Agustus 2020;
- g. Konsep Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Internal dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal telah disusun dan diserahkan ke Inspektur Jenderal.

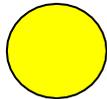
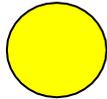
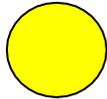
Sampai dengan bulan Agustus 2020, masih dilakukan pembahasan peraturan-peraturan tersebut dengan pada *stakeholders* dan belum terdapat peraturan yang resmi dikeluarkan.

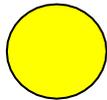
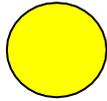
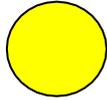
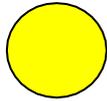
Capaian kinerja berdasarkan rencana aksi pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020, sebagaimana terlampir pada tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	Telah dilaksanakan pelayanan klinik konsultasi Itjen TW III	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	- Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal mencapai 24% dari target yang tertuang di perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 91%	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Forum komunikasi PMPRB - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai rata-rata PMPRB unit kerja eselon I Kemenperin: Nilai akhir pemenuhan 13,78; Nilai akhir Reform: 19,97; Nilai akhir total pengungkit: 33,74 - Penilaian mandiri zona integritas: - Belum terlihat pemahanan yg utuh terhadap substansi 6(enam) area perubahan - Belum terlihat terjadinya pola piker dan budaya kerja - Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah dll 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Belum dilaksanakan	
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat 	<ul style="list-style-type: none"> - Monev dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), belum semua IR melakukan pengisian survey 	
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pra evaluasi SAKIP ITJEN 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen - Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja - Telah dilaksanakan pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Itjen 	
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi 	-	
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Permenperin tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP; - Penyusunan konsep peraturan Inspektur Jenderal tentang telaah sejawat, Peraturan Inspektur Jenderal tentang telaah sejawat eksternal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang kendali mutu 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
				<p>pengawasan, peraturan Irjen tentang kode etik pegawai Inspektorat Jenderal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan konsep pedoman audit kinerja penumbuhan dan pengembangan Ditjen IKMA pada tahap finalisasi - Pembahasan pedoman kenaikan jabatan fungsional auditor 5 agustus 2020 	
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Rencana Kinerja 2021 - Penyusunan Pagu Indikatif 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja 2021 sebesar 70%, Restrukturisasi Anggaran - Pagu indikatif baru dimulai, dirapatkan tanggal 1 Oktober 2020 - Penyesuaian Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Inspektorat Jenderal tahun 2021 masih perlu dilakukan koordinasi dengan DJA pada tahap pagu alokasi 	
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Data dan informasi 	<i>Website</i> tidak dapat diakses	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal 	-	
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah disusun laporan APIP Semester I tahun 2020 sampai dengan akhir agustus, Itjen belum selesai menyusun laporan hasil pengawasan internal yang harus disampaikan ke Menteri Perindustrian. 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	- PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Belum dilakukan karena belum diklat substansi pengawasan	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	- Diklat Perjenjangan calon auditor, - Diklat latsar CPNS Gol 2 - Inpassing Jabatan fungsional perbendaharaan	
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	Telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui hukumonline.com serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan	
		Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	- Persiapan Penataan Sistem Informasi	- Persiapan Penataan Sistem Informasi telah dilakukan - Kolaborasi menuju WBK-WBBM melalui aplikasi PMPZI Online	
		Layanan Perkantoran	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan Kantor - Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan	Layanan rutin bulanan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN - Penyusunan RK-BMN 		

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat semua indikator kinerja belum menggambarkan pencapaian target kinerja, dikarenakan pengukuran baru dapat dilakukan setelah semua unsur-unsur pengukuran terpenuhi.

Tabel 10. Realisasi Kegiatan/Output Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
2	Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
3	Layanan Perkantoran	12 Layanan	3	3	3	3	3	3	-	-

Sedangkan pencapaian keluaran dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal secara rinci dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 11. Kegiatan Fisik dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan III			s/d Triwulan III			Sisa Anggaran s/d Triwulan III	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.932.744.000	7,00	476.296.203	16,24	35,19	1.776.636.231	60,58	1.156.107.769	39,42
Layanan Sarana dan Prasarana	105.000.000		102.051.400	97,19		102.051.400	97,19	2.948.600	2,80
Layanan Perkantoran	21.765.383.000	19,79	5.106.124.127	23,46	59,36	14.227.956.707	65,37	7.537.426.293	34,63
TOTAL	24.803.127.000	18,21	5.684.471.730	22,92	56,59	16.106.644.338	64,94	8.696.482.662	35,06

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan III sebagian besar telah berjalan sesuai dengan rencana namun masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat menghasilkan output (keluaran) yang dapat diukur karena pada triwulan ini merupakan tahapan proses pelaksanaan tugas-tugas rutin yang harus diselesaikan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

1. Adanya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak terkait langsung harus menggunakan akun biasa. Sementara selama ini telah terlanjur dilakukan penyesuaian akun kegiatan dengan menggunakan akun COVID-19;
2. Beberapa anggaran kegiatan dialokasikan pada kegiatan percepatan penanganan COVID-19 untuk dapat menjaga ketercapaian output pada akhir tahun.

D. Langkah Tindak Lanjut

Upaya dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Terkait Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Langkah yang dilakukan adalah dengan merevisi anggaran dalam rangka ralat akun;

2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/kordinator kegiatan agar mengatur ulang perencanaan kegiatan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah terjadwal pada triwulan IV tahun 2020 sehingga target kinerja dapat tercapai.

BAB IV. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2020 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Pada Triwulan III capaian fisik mencapai 18,21% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp5.684.471.730,- atau 22,92 % dari pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp24.803.127.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III (Januari-September) mencapai Rp16.106.644.338,- atau 64,94% dari pagu anggaran dan capaian fisik mencapai 56,59%.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum sepenuhnya tercapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan proses pelaksanaan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV akan dilaksanakan penjadwalan ulang dengan perbaikan tahapan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal periode Triwulan III Tahun 2020, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	229.340.000	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bag HO
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	182.590.000	91%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan /pemutakhiran Data 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan /pemutakhiran Data 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan /pemutakhiran Data 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian PTLEHP, sub bag PTLHP

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
							Tindak Lanjut	Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal	Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	121.000.000	70%	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	- Forum komunikasi PMPRB - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian PTLEHP
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	6.760.000	3	-	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Provalap, sub bag Program
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	505.827.000	75%	-	-	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Provalap, sub bag Evalap

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		dengan standar pelaksanaan pengawasan	Inspektorat Jenderal -Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri -Pelaksanaan Penelaahan Sejawat					Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat		
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	-Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 -Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP -Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	154.370.000	IACM Level 3	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Penilaian SAKIP Eselon II - -Pra evaluasi SAKIP ITJEN	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Reviu Perkin dan Renstra - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bag HO

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	-Pengembangan Informasi Pengawasan -Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal -Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi -Penerbitan Majalah Solusi	153.220.000	10%	- Pengembang an Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembang an Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaa n website Inspektorat Jenderal - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembang an Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaa n website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembang an Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaa n website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Keuangan dan Umum, sub bagian umum
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	74.702.000	50%	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bag HO

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
							Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal			
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL 	591.370.000	70%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Provalap, sub bagian Evalap

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	- Pemutakhiran Data dan Informasi	12.536.000	80%	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian PTEHP sub bagian PTLHP
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	231.230.000	80%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian Kepegawaian
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan APIP	25.810.000	90%	- Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan APIP	- Penilaian SAKIP Eselon I - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian HO

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			- Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP				Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP	industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan		19.775.000	85%	PKS	PKS	PKS	PKS		Bagian KHO, sub bagian Kepegawaian
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun	285.380.000	50%	- Koordinasi Pengembangan SDM - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan	-	- Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian Kepegawaian

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian				Kepegawaian				
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	231.980.000	90%	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian HO
		Layanan Perkantoran	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana	21.870.383.000	12 Layanan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan Kantor - Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan Kantor - Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Keuangan dan Umum, sub bagian keuangan dan sub bagian Umum

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Operasional Kantor -Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan -Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif -Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN -Penyusunan RK-BMN			dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN - Penyusunan RK-BMN	dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Workshop Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Koordinasi dalam rangka Penataan	dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi	dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi		

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
						Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN	dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN -Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN -Penyusunan RK-BMN		